



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Nota Dinas Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10/BPPERDA/DPRD/ND/XI/2024, perihal Hasil Koordinasi Penyusunan Propemperda Tahun 2025 tanggal 20 November 2024, telah dilakukan harmonisasi dan koordinasi bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap usulan daftar rancangan peraturan daerah untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, telah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Hasil Penyusunan Propemperda yang telah disepakati ditetapkan dalam Keputusan DPRD melalui rapat paripurna DPRD;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/1606.1/KUM/2024 hal Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 tanggal 8 November 2024;
  2. Nota Dinas Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 59/ND/Komisi I/2024 perihal Usul Raperda Prioritas Komisi I Untuk Propemperda, tanggal 21 November 2024;
  3. Nota Dinas Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06/ND/Kom-II/XI/2024 perihal Usulan Raperda Komisi II Untuk Propemperda Tahun 2025, 7 November 2024;
  4. Nota Dinas Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 08/ND/Kom-III/XI/2024, Perihal Usulan Raperda Prioritas Komisi III Untuk Propemperda 2025;
  5. Nota Dinas Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 09/ND/Kom-IV/XI/2024, Perihal Penyampaian Usul raperda Prioritas Komisi IV Untuk Propemperda 2025;
  6. Nota Dinas Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10/BPPERDA/DPRD/ND/XI/2024 perihal Hasil Koordinasi Penyusunan Propemperda Tahun 2025 tanggal 20 November 2024
  7. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, hari Kamis tanggal 28 November 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan Daftar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 baik yang berasal dari usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses Pembentukan

Peraturan Daerah pada tahun 2025.

- KETIGA : Segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



HESUPIAN HK

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Plt. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2024  
 TENTANG  
PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH BAIK YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 TAHUN 2025

No.	JENIS	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Pengusul	Target Penyalpaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PERDA	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	✓		Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi		✓	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2025	
2.	PERDA	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025		✓	Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi		✓	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2025	
3.	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	✓		Perintah perundang-undangan yang lebih tinggi		✓	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2025	

4.	PERDA	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan			✓	Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi		✓	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	2025	
5.	PERDA	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029		✓		Perintah Perundang-undangan yang lebih tinggi		✓	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2025	
6.	PERDA	Tanggung Jawab Sosial Lingkungan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2025	
7.	PERDA	Penyelenggaraan Perhubungan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Perhubungan	2025	
8.	PERDA	Pembiayaan Tahun Jamak Provinsi Kalimantan Selatan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2025	
9.	PERDA	Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	2025	
10.	PERDA	Penyelenggaraan Penanaman Modal		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2025	

11.	PERDA	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2025	
12.	PERDA	Pengembangan Taman Bumi		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2025	
13.	PERDA	Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Kehutanan	2025	
14.	PERDA	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2025	
15.	PERDA	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah			✓	Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2025	
16.	PERDA	Satu Data Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2025	
17.	PERDA	Mars Bergerak		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2025	
18.	PERDA	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi I	2025	
19.	PERDA	Pembentukan Produk Hukum Daerah		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi I	2025	
20.	PERDA	Penyelenggaraan Perdagangan di Kalimantan Selatan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi II	2025	
21.	PERDA	Penyelenggaraan Pangan di Kalimantan Selatan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi II	2025	

22.	PERDA	Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi III	2025	
23.	PERDA	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi III	2025	
24.	PERDA	Penyelenggaraan Kesehatan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi IV	2025	
25.	PERDA	Penyelenggaraan Keolahragaan		✓		Pelaksanaan Otonomi Daerah	✓		Komisi IV	2025	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



H. SUPIAN HK